

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005*. Jakarta: ELSAM, 2025.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Azhari, Doni, dkk. *Sosiologi Hukum*. Disunting oleh Abdul Azis. Malang: CV Duta Sains Indonesia, 2024.
- Binsar Gultom. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Yogyakarta: Peradaban, 2007.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Maya Shafira, dkk. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.
- Prinst, H.R. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Smith, Rhona K. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2009.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 340. (Jakarta, 2022)
- Peraturan Bersama Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal Ilmiah

Ahmad Bardi. "Kewenangan LPSK dalam Penetapan *Justice Collaborator* dalam Kasus Tindak Pidana Umum di Indonesia (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)." *Unizar Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Adi Syahputra Sirait. "Kedudukan dan Efektivitas *Justice Collaborator* dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 2, 2019.

Antonius Yoseph Bou, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana. "Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Isti Latifah Asti, dan Sidik Sunaryo. "Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika." *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Dewi Bunga, dkk. "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2024.

- Djernih Sitanggang, dkk. "Penggunaan *Justice Collaborator* dalam Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel." *Cahaya Mandalika*, 2022.
- Dwi Oktafia Ariyanti, dan Muhammad Ramadhan. "Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Jerman." *Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 3, 2023.
- Ekumala Wahyu Paldina, dan Ani Triwati. "Perlindungan Hukum bagi *Justice Collaborator*: Studi Kasus Putusan Nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Fransisco F. Alwer, dan Mompang L. Pangabea. "Penggunaan *Justice Collaborator* dalam Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel."
- Hery Gunawan, dan Gerhard R.A. Pangaribuan. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama." *Diktum*, Vol. 2, 2023.
- I Gede Engga Suandita, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti. "Pengaturan Hukum Terkait Hak dan Kewajiban terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Janpatar Simamora. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014.
- J. H. Sinaulan. "Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat." *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4, 2018.
- Laurensius Arliman S. "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 1, 2019.
- Muh Ikhsan, Nasrullah Arsyad, dan St. Ulfah. "Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Alauddin Law Development*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Muhammad Rizky. "Pengaturan dan Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, 2021.

- Nita Ariyani. "Model Pelindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, 2020.
- Nomero Armandheo Simamora, dan Edi Pranoto. "Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang sebagai *Justice Collaborator* di Indonesia." *IBLAM Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Peter W. Schroth. "The United Nations Convention against Corruption: Policy, Analysis, and Cross-Cultural Implications." *Wisconsin International Law Journal*, Vol. 23, No. 3, 2005.
- Ridwan Arifin, dkk. "Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT)." *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, 2016.
- Rusli Muhammad. "Pengaturan dan Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 2, 2015.
- Yenny Fotri Z., Yogi Alfiandra, dan Sukmareni. "Peranan *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku) yang Bekerja Sama dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Richard Eliezer)." *Rio Law Jurnal*, Vol. 4, 2023.

D. Skripsi/Tesis

- Adhani, Nadifa. *Kedudukan Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana pada Kasus Richard Eliezer*. Skripsi S-1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Fakhrullah, Zudan Arif. *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadya Yogyakarta)*. Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Lintang, Febriani Tri Putri. *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Terdakwa sebagai Justice Collaborator dalam Pengungkapan*

Kasus Tindak Pidana Narkotika. Skripsi S-1, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018.

Lindiana, Riski Nurul. *Penerapan Justice Collaborator pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Skripsi S-1, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2019.

Hunafa, Wahyu. *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Skripsi S-1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, 2023.

Widiyanti, Ari. *Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Skripsi S-1, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, 2023.

E. Website

Hechler, H., dan Hässler, S. *UNCAC in a Nutshell. A quick guide to the United Nations Convention against Corruption* (U4 Anti-Corruption Resource Centre, 2011) <https://www.u4.no/publications/uncac-in-a-nutshell>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). **"Learn About the United Nations Convention against Corruption (UNCAC)."** Tersedia pada: <https://www.unodc.org/corruption/en/uncac/learn-about-uncac.html>.

Diakses pada 16 Februari 2026.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). **"Signature and Ratification Status of the United Nations Convention against Corruption."** Tersedia pada: <https://www.unodc.org/corruption/en/uncac/ratification-status.html>.

Diakses pada 16 Februari 2026.

F. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.